

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT KERJA PANSUS**  
**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa persidangan : V  
Rapat ke :  
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua  
Dengan : BPKP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Rabu, 2 Juni 2021  
Waktu : 14.20 s.d. 17.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3  
Acara : Penjelasan terhadap hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP dalam pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus  
Hadir : 1. Hadir 11 anggota dari 30 orang anggota Pansus.  
- 6 hadir fisik  
- 4 hadir virtual  
- 1 Sakit  
2. Pemerintah:  
- Kepala BPKP  
3. DPD RI  
- Filep Wamafwa, S.H., M.H.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Pansus DPR RI memberikan apresiasi kepada Kepala BPKP beserta jajaran atas kehadirannya memenuhi undangan Pansus DPR RI dalam acara Rapat Dengar Pendapat.

2. Pansus DPR RI dapat memahami penjelasan dan data atau informasi yang disampaikan oleh Kepala BPKP, namun Pansus DPR RI meminta agar BPKP menyampaikan data susulan hasil pengawasan dana otsus sejak tahun 2002. Data tersebut akan dipergunakan oleh fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM.
3. Pansus DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala BPKP terkait upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi oleh BPKP dalam tata kelola penggunaan dana otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Pansus DPR RI mendukung agar BPKP untuk terus membina dan mendampingi Pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) agar penggunaan dana otsus tepat sasaran.
5. Pansus DPR RI memberikan catatan atas usul BPKP terkait pentingnya regulasi mengenai dana SILPA yang berasal dari dana otsus agar dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan otsus.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

**KETUA PANSUS**



**KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.**  
A.263